

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Didalam hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai deskripsi data, tingkat pengembalian kuesioner, gambaran umum responden, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, dan analisis hasil uji hipotesis.

4.1.1 Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuisisioner kepada responden yang terpilih dibidang yang berkaitan dengan anggaran diantaranya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PP SPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) dan bendahara pengeluaran pada 11 SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang terpilih menjadi sampel. Kuisisioner yang disebarakan pada setiap SKPD terdiri dari 4 rangkap untuk masing-masing jabatan tersebut. Kuisisioner diserahkan dibagian umum pada setiap SKPD dan dikhususkan untuk jabatan PPTK diserahkan dibagian perencanaan.

Tahap pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 27 Februari sampai tanggal 27 Maret 2014. Pendistribusian kuisisioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuisisioner kepada para responden. Peneliti menetapkan janji untuk pengambilan kuisisioner selama 1 minggu terhitung sejak kuisisioner diantarkan kepada responden atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara responden dan peneliti.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 responden. Dari 44 (100%) kuisisioner yang disebarakan, 39 (88%) kuisisioner yang diterima kembali oleh

peneliti, 3 (12%) kuisiener tidak kembali. Lalu dari kuisiener yang diterima 39 (100%) , 36 (92%) kuisiener yang dapat diolah, 3 (8%) kuisiener tidak dapat diolah oleh peneliti dikarenakan kuisiener yang diberikan tidak diisi secara lengkap oleh responden. Rincian mengenai tingkat pengembalian kuisiener disajikan didalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rincian tingkat pengembalian kuisiener

No	Nama SKPD	Jumlah kuisiener yang dibagikan	Jumlah kuisiener yang kembali	Jumlah kuisiener yang diolah
1.	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu	4	4	3
2.	Dinas ESDM Provinsi Bengkulu	4	4	4
3.	Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu	4	4	3
4.	Diskoperindag dan UKM Provinsi Bengkulu	4	3	3
5.	Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu	4	3	3
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	4	4	4
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	4	4	4
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu	4	3	3
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	4	4	3
10.	Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu	4	3	3

11.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu	4	3	3
TOTAL		44	39	36

Sumber : data primer diolah 2014

4.1.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan. Dari data tersebut deskripsi responden dibagi berdasarkan pendidikan, bidang pendidikan, masa kerja dan jabatan. Adapun gambaran karakteristik yang dibagi berdasarkan responden disajikan dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2
Deskripsi responden

Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin		
Pria	19	53%
Wanita	17	47%
Total	36	100%
Pendidikan		
Perguruan Tinggi	36	100%
Total	36	100%
Bidang Pendidikan		
Sarjana Ekonomi (S.E.)	15	43%
Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.)	12	33%
Sarjana Komputer (S.Kom.)	5	14%
Sarjana Pertanian (S.P.)	3	5%
Sarjana Perternakan (S.P.T.)	2	5%
Total	36	100%
Lama Bekerja		
< 5 tahun	5	14%
5-10 tahun	12	33%
>10 tahun	19	53%

Total	36	100%
Jabatan		
PPK	11	31%
PPTK	11	31%
PP-SPM	5	13%
Bendahara Pengeluaran	9	25%
Total	36	100%

Sumber : data primer diolah 2014

Dari 36 kuisioner yang dapat diolah, gambaran umum responden yang terinci pada tabel 4.2 dilihat dari jenis kelamin responden, pria 19 orang (53%) dan wanita 17 orang (47%), artinya sebagian besar responden adalah pria. Dilihat dari tingkat pendidikan responden, seluruh responden yang berjumlah 36 (100%) orang adalah sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada beberapa SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah baik mengingat pendidikan responden yang 100% sarjana. Jika dilihat dari bidang pendidikan para responden yang sebagian besar adalah sarjana ekonomi jurusan akuntansi dan manajemen serta sarjana ilmu politik jurusan ilmu administrasi negara, maka dapat dilihat bahwa responden sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan anggaran dan sistem administrasi yang baik.

Dilihat dari lamanya responden bekerja, kurang dari 5 tahun sebanyak 5 orang (14%), 5-10 tahun 12 orang (33%) dan lebih dari 10 tahun 19 orang (53%). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah bekerja selama lebih dari 10 tahun sehingga menunjukkan bahwa responden sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan cukup baik dalam bidang penganggaran. Sedangkan dari jabatan responden mayoritas responden adalah PPTK sebanyak 11 orang atau 31% dan PPK juga sebanyak 11 orang atau 31%.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviation. Nilai minimum merupakan nilai terendah dari suatu distribusi data. Pengukuran rata-rata (mean) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai interval dari suatu distribusi data, rata-rata hitung (mean) dari sekelompok atau serangkaian data adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan rata-rata hitung sekelompok data tersebut. Adapun hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Rata-rata Teoritis	Kisaran Aktual	Mean	Std. Deviation
PAN (Y)	36	3 – 15	9	5 – 13	9,97	2,035
DPR (X1)	36	9 – 45	27	17 – 43	30,75	7,287
PA (X2)	36	6 – 30	18	15- 26	19,92	2,832
KSDM (X3)	36	3 – 15	9	7 – 14	10,17	2,007
DP (X4)	36	3 – 15	9	5 – 14	9,72	2,445
UP (X5)	36	3 – 15	9	6 – 14	9,97	2,249

Sumber: data primer diolah 2014

Tabel 4.4

Persentase Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Pilihan Jawaban	Variabel					
	PAN	DPR	PA	KSDM	DP	UP
1	1,85%	1,54%	-	-	0,93%	-

2	11,11%	17,6%	11,57 %	11,11%	18,52 %	15,74 %
3	45,37%	29,63 %	47,69 %	48,15%	46,30 %	45,37 %
4	36,11%	40,12 %	37,96 %	31,48%	24,07 %	29,63 %
5	5,56%	11,11 %	2,78%	9,26%	10,18 %	9,26%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: data primer diolah 2014

Variabel penyerapan anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 5 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas dari 36 responden dihasilkan rentang aktual antara 5 – 13, artinya tingkat penyerapan anggaran aktual responden minimal berada pada kisaran 5 dan tingkat penyerapan anggaran aktual responden maksimal berada pada kisaran 13. Sedangkan rentang yang terjadi adalah antara 3 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 15 (menunjukkan nilai yang paling tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban dengan poin 3 adalah jawaban terbanyak responden yaitu sebesar 45,37%.

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden pada penyerapan anggaran adalah 9,97 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran sudah cukup baik atau tinggi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel penyerapan anggaran adalah sebesar 2,035. Hal ini menandakan

bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean.

Variabel dokumen perencanaan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 9 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas dari 36 responden dihasilkan rentang aktual antara 17 – 43, artinya tingkat dokumen perencanaan aktual responden minimal berada pada kisaran 17 dan tingkat dokumen perencanaan aktual responden maksimal berada pada kisaran 43. Sedangkan rentang yang terjadi adalah antara 9 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 45 (menunjukkan nilai yang paling tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban dengan poin 4 adalah jawaban terbanyak responden yaitu sebesar 40,12%.

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden dokumen perencanaan adalah 30,75 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 27. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang sudah baik di instansi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel dokumen perencanaan adalah sebesar 7,287. Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean.

Variabel pencatatan administrasi diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas dari 36 responden dihasilkan rentang aktual antara 15 – 26, artinya tingkat pencatatan administrasi aktual responden minimal berada pada kisaran 15 dan tingkat

pencatatan administrasi aktual responden maksimal berada pada kisaran 26. Sedangkan rentang yang terjadi adalah antara 6 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 30 (menunjukkan nilai yang paling tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban dengan poin 3 adalah jawaban terbanyak responden yaitu sebesar 47,69%.

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden pada pencatatan administrasi adalah 19,92 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 18. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem pencatatan administrasi yang sudah baik di instansi. Standar deviasi untuk variabel pencatatan administrasi adalah sebesar 2,832. Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean.

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 3 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas dari 36 responden dihasilkan rentang aktual antara 7 – 14, artinya tingkat kompetensi sumber daya manusia aktual responden minimal berada pada kisaran 7 dan tingkat kompetensi sumber daya manusia aktual responden maksimal berada pada kisaran 14. Sedangkan rentang yang terjadi adalah antara 3 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 15 (menunjukkan nilai yang paling tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban dengan poin 3 adalah jawaban terbanyak responden yaitu sebesar 48,15%.

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden pada kompetensi sumber daya manusia adalah 10,17 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat kompetensi SDM yang cukup baik di instansi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 2,007. Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean.

Variabel dokumen pengadaan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 3 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas dari 36 responden dihasilkan rentang aktual antara 5– 14, artinya tingkat dokumen pengadaan aktual responden minimal berada pada kisaran 5 dan tingkat dokumen pengadaan aktual responden maksimal berada pada kisaran 14. Sedangkan rentang yang terjadi adalah antara 3 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 15 (menunjukkan nilai yang paling tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban dengan poin 3 adalah jawaban terbanyak responden yaitu sebesar 46,30%.

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden pada dokumen pengadaan adalah 9,72 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat penyajian dokumen pengadaan yang sudah baik di instansi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel dokumen pengadaan adalah sebesar 2,445.

Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean.

Variabel uang persediaan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 3 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3 diatas dari 36 responden dihasilkan rentang aktual antara 6 – 14, artinya tingkat uang persediaan aktual responden minimal berada pada kisaran 6 dan tingkat ganti uang persediaan aktual responden maksimal berada pada kisaran 14. Sedangkan rentang yang terjadi adalah antara 3 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 15 (menunjukkan nilai yang paling tinggi). Dari tabel distribusi jawaban dapat dilihat bahwa pilihan jawaban dengan poin 3 adalah jawaban terbanyak responden yaitu sebesar 45,37%.

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden pada uang persediaan adalah 9,97 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 9. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis dapat disimpulkan bahwa terdapat mekanisme mengenai uang persediaan yang sudah cukup baik di instansi. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel uang persediaan adalah sebesar 2,249. Hal ini menandakan bahwa sebaran data sudah baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2011). Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada 0,05 atau 0,01.

Tabel 4.5
Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Keterangan
1	Penyerapan Anggaran (Y)	Y.1	0,856	Valid
		Y.2	0,833	Valid
		Y.3	0,795	Valid
2	Dokumen Perencanaan (X1)	X1.1	0,812	Valid
		X1.2	0,858	Valid
		X1.3	0,805	Valid
		X1.4	0,881	Valid
		X1.5	0,837	Valid
		X1.6	0,805	Valid
		X1.7	0,868	Valid
		X1.8	0,842	Valid
		X1.9	0,899	Valid
3	Pencatatan Administrasi (X2)	X2.1	0,490	Valid
		X2.2	0,521	Valid
		X2.3	0,832	Valid
		X2.4	0,713	Valid
		X2.5	0,699	Valid
		X2.6	0,716	Valid
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	X3.1	0,817	Valid
		X3.2	0,851	Valid
		X3.3	0,798	Valid
5	Dokumen Pengadaan (X4)	X3.1	0,907	Valid
		X3.2	0,927	Valid
		X3.3	0,848	Valid

6	Uang Persediaan (X5)	X3.1	0,907	Valid
		X3.2	0,928	Valid
		X3.3	0,785	Valid

Sumber: data primer diolah 2014

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai 0,70 maka instrumen yang digunakan reliabel (Ghozali : 2011). Berdasarkan Tabel 4.6 berikut ini dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

Tabel 4.6
Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penyerapan Anggaran (Y)	0,764	Reliabel
Dokumen Perencanaan (X1)	0,949	Reliabel
Pencatatan Administrasi (X2)	0,749	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,761	Reliabel
Dokumen Pengadaan (X4)	0,871	Reliabel
Uang Persediaan (X5)	0,842	Reliabel

Sumber: data primer diolah 2014

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dasar pengambilan keputusan nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 4.7 berikut ini dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2 tailaed)	Keterangan
Dokumen Perencanaan (X1)	0,776	Normal
Pencatatan Administrasi (X2)	0,615	Normal
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,439	Normal
Dokumen Pengadaan (X4)	0,445	Normal
Uang Persediaan (X5)	0,725	Normal
Penyerapan Anggaran (Y)	0,597	Normal

Sumber: data primer diolah 2014

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna(korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai *tolerance/variance inflation factor(VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1/*VIF* kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa model uji tidak terdeteksi kasus multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
----------	-----------	-----	------------

Dokumen Perencanaan (X1)	0,564	1,773	Bebas Multikolinearitas
Pencatatan Administrasi (X2)	0,684	1,463	Bebas Multikolinearitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,607	1,648	Bebas Multikolinearitas
Dokumen Pengadaan (X4)	0,599	1,668	Bebas Multikolinearitas
Uang Persediaan (X5)	0,437	2,290	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data primer diolah 2014

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.8 diatas, seluruh variabel tidak ada yang memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 0.10 dan tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan demikian model regresi pada persamaan ini bebas dari adanya multikolinearitas.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *glejser*. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel bebas $\geq 0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Dokumen Perencanaan (X1)	,455	Bebas heteroskedastisitas
Pencatatan Administrasi (X2)	,152	Bebas heteroskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	,249	Bebas heteroskedastisitas

Dokumen Pengadaan (X4)	,681	Bebas heteroskedastisitas
Uang Persediaan (X5)	,342	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : data primer diolah 2014

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 20. Hasil dari regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien β	Nilai Koefisien	Nilai t	Sig	Status
Dokumen Perencanaan (X1)	β_1	0,033	1,085	0,287	Ditolak
Pencatatan Administrasi (X2)	β_2	0,001	0,007	0,994	Ditolak
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	β_3	0,288	2,668	0,012	Diterima
Dokumen Pengadaan (X4)	β_4	0,320	3,586	0,001	Diterima
Uang Persediaan (X5)	β_5	0,280	2,463	0,020	Diterima
R Square=0,891 Adjusted R²=0,759 F=23.072 Signifikan=0,000 N=36					

Sumber: data primer diolah 2014

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Hal ini berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas (Ghozali,2011).

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* (R^2)=0,759. Hal ini mengandung pengertian bahwa 75% varian variabel penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel dokumen perencanaan (X_1), pencatatan administrasi (X_2), kompetensi SDM (X_3), dokumen pengadaan (X_4) dan uang persediaan (X_5) sedangkan sisanya sebesar 25% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (F test)

Uji kelayakan model dilakukan dengan uji F (F test). Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan model variabel yang digunakan. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan derajat kepercayaan dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Apabila hasil dari uji F adalah signifikan P value $\leq 0,05$ maka model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Sebaliknya jika P value $\geq 0,05$ maka model regresi yang digunakan dianggap tidak layak uji. Hasil uji pada tabel 4.10 diperoleh nilai $F = 23.072$ dengan nilai signifikansi sebesar P value = 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan kelima variabel mampu menjelaskan fenomena penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah Provinsi Bengkulu.

4.5.3 Uji t-test

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih

kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali,2011).

Tingkat signifikansi variabel dokumen perencanaan (0,287) lebih dari tingkat signifikan (0,05), maka dapat disimpulkan hipotesis 1 **ditolak**. Hal ini membuktikan bahwa dokumen perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif ($\beta = 0,033$) dengan nilai t-statistik 1.085. Hal ini berarti baik atau buruknya dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel dokumen perencanaan tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pencatatan administrasi (0,994) lebih dari tingkat signifikan (0,05) sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 **ditolak**. Hal ini membuktikan bahwa pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan arah pengaruhnya positif ($\beta = 0.001$) dengan nilai t-statistik 0.007. Hal ini berarti baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi, sehingga tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran..

Tingkat signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia (0,012) kurang dari tingkat signifikan (0,05), maka hipotesis 3 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh yang positif ($\beta =$

0,288) dengan t-statistik 2.668. Hal ini berarti semakin memadai kompetensi sumber daya manusia yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga variabel kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel dokumen pengadaan (0,001) kurang dari tingkat signifikan (0,05) sehingga hipotesis 4 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan arah pengaruhnya positif ($\beta = 0,320$) dengan statistik 3.586. Hal ini berarti semakin baiknya dokumen pengadaan yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga variabel dokumen pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel uang persediaan (0,001) kurang dari tingkat signifikan (0,05) sehingga hipotesis 5 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa uang persediaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan arah pengaruhnya positif ($\beta = 0,280$) dengan statistik 2.463. Hal ini berarti semakin baik mekanisme uang persediaan yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga variabel uang persediaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

4.2 Pembahasan

Penyerapan anggaran yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini memiliki persentase frekuensi responden dengan skala 3 atau sebesar 45,37% yang artinya penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu masih berada pada kisaran penyerapan anggaran yang dapat dikatakan tergolong rendah dan juga cukup tinggi. Tetapi pada poin 4 dengan persentase terbesar kedua jawaban responden, yaitu sebesar 36,11%, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu masih dalam keadaan yang cukup baik atau tergolong masih tinggi.

4.2.1 Pengaruh Dokumen Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Berbeda dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa dokumen perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terlihat dari pilihan jawaban pegawai-pegawai suatu SKPD yang menghasilkan dokumen perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang tidak mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dari pertanyaan kuisisioner mengenai dokumen perencanaan yang dijawab oleh responden, pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden memiliki persentase terbesar dengan pilihan jawaban pada skala 4 yaitu sebesar 40,12%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah

cukup baik sehingga juga dapat menghasilkan penyerapan anggaran yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari persentase pada variabel penyerapan anggaran yang memiliki persentase terbesar kedua pada skala 4 yaitu sebesar 36,11% dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tergolong cukup tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa baik atau buruknya suatu dokumen perencanaan yang dihasilkan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh beberapa SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi beberapa SKPD untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dijawab oleh responden pada kuisisioner yang diberikan, yaitu pada pernyataan “anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR” sebanyak 27,8% responden memilih jawaban pada skala 1 dan 2, hal tersebut menunjukkan bahwa masih sering terdapat pemblokiran anggaran yang terjadi pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, misalnya program dan kegiatan belum mendapatkan persetujuan dari DPR, adanya kegiatan yang belum jelas dasar hukumnya, dan adanya rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kuswoyo (2011), Herriyanto (2012) dan Priatno (2013). Yang menghasilkan bahwa perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.2.2 Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa administrasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi dalam penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran terlihat dari pilihan jawaban pegawai-pegawai suatu SKPD yang menghasilkan pencatatan administrasi ini menjadi salah satu faktor yang tidak mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dari pertanyaan kuisisioner mengenai pencatatan administrasi yang dijawab oleh responden, pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 47,69% dan 37,69%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan administrasi pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, sehingga dapat menghasilkan penyerapan anggaran yang juga tinggi. Hal tersebut terlihat dari persentase pada variabel penyerapan anggaran yang memiliki persentase terbesar pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 45,37% dan 36,11% dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tergolong cukup tinggi. Namun hasil penelitian menunjukkan

bahwa baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan administrasi yang ada pada beberapa SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih ada beberapa faktor yang dirasa menjadi hambatan bagi beberapa SKPD untuk dapat memaksimalkan sistem pencatatan administrasinya. Faktor tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dijawab oleh responden pada kuisisioner yang diberikan, yaitu pada pernyataan “masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung” sebanyak 22,2% responden memilih jawaban pada skala 2, hal tersebut menunjukkan bahwa waktu penyusunan anggaran dianggap terlalu singkat sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mempersiapkan data.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priatno (2013) yang menghasilkan bahwa administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012) yang menghasilkan bahwa administrasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji hipotesis ini sama dengan hipotesis sebelumnya yang

menunjukkan adanya pengaruh SDM terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran terlihat dari pilihan jawaban pegawai-pegawai suatu SKPD yang menghasilkan kompetensi SDM ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dari pertanyaan kuisisioner mengenai kompetensi sumber daya manusia yang dijawab oleh responden, pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 48,15% dan 31,48%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin memadai kompetensi SDM yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Hal tersebut terlihat dari persentase pada variabel penyerapan anggaran yang memiliki persentase terbesar pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 45,37% dan 36,11% dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tergolong cukup tinggi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada pada beberapa SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu sudah cukup memadai, namun masih ada beberapa faktor yang menyebabkan sumber daya manusia dari beberapa SKPD yang dirasa belum memadai.. Faktor tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dijawab oleh responden pada kuisisioner yang diberikan, yaitu pada pernyataan “sumber daya pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten” sebanyak 11,1% responden memilih jawaban pada

skala 2, hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai-pegawai pada beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Herriyanto (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran.

4.2.4 Pengaruh Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sama halnya dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran terlihat dari pilihan jawaban pegawai-pegawai suatu SKPD yang menghasilkan dokumen pengadaan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dari pertanyaan kuisisioner mengenai dokumen pengadaan yang dijawab oleh responden, pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 46,30% dan 24,7%.. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik dokumen pengadaan yang dihasilkan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Hal tersebut terlihat dari persentase pada variabel penyerapan anggaran yang memiliki persentase terbesar pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 45,37% dan 36,11% dimana hal ini menunjukkan

penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu dikatakan tergolong cukup tinggi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dokumen pengadaan yang dihasilkan oleh beberapa SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi beberapa SKPD untuk dapat menghasilkan dokumen pengadaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dijawab oleh responden pada kuisisioner yang diberikan, yaitu pada pernyataan “pejabat/pengelola keuangan sering mengalami mutasi” sebanyak 25% responden memilih jawaban pada skala 1, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pejabat/pengelola keuangan pada beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang masih banyak mengalami mutasi pada masa jabatannya belum berakhir.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012). Hasil penelitian terdahulu dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.2.5 Pengaruh Uang Persediaan terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang persediaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sama halnya dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa uang persediaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa uang persediaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran terlihat dari pilihan jawaban pegawai-pegawai suatu SKPD

yang menghasilkan uang persediaan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dari pertanyaan kuisisioner mengenai uang persediaan yang dijawab oleh responden, pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh sebagian besar responden adalah pilihan jawaban pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 45,37% dan 29,63%. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin bagus mekanisme mengenai uang persediaan yang ada maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Hal tersebut terlihat dari persentase pada variabel penyerapan anggaran yang memiliki persentase terbesar pada skala 3 dan 4 yaitu sebesar 45,37% dan 36,11% dimana hal ini menunjukkan penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tergolong cukup tinggi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme mengenai uang persediaan yang ada pada beberapa SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih ada beberapa faktor yang menjadi masalah bagi beberapa SKPD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada mekanisme uang persediaan tersebut. Faktor tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dijawab oleh responden pada kuisisioner yang diberikan, yaitu pada pernyataan “kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tetapi belum diganti melalui Ganti Uang Persediaan (GUP)” sebanyak 22,2% responden memilih jawaban pada skala 2. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai uang

persediaan yang belum diganti dengan GUP masih sering terjadi pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012). Hasil penelitian terdahulu dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa uang persediaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan realisasi anggaran pada SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hal ini menunjukkan baik atau buruknya dokumen perencanaan yang disajikan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

2. Pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi yang ada pada suatu SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin memadai kompetensi SDM yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran.
4. Dokumen pengadaan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik dokumen pengadaan yang disajikan pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran.
5. Uang persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik mekanisme uang persediaan yang ada pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran.

5.2 Implikasi penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan tidak terdapat pengaruh dokumen perencanaan dan pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah memiliki penyerapan anggaran yang cukup tinggi meskipun masih terdapat

beberapa SKPD yang mengalami penyerapan anggaran yang rendah. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memaksimalkan penyerapan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan proses pembangunan suatu daerah, serta membuktikan bahwa Pemerintahan di Provinsi Bengkulu dapat menerapkan sistem otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu berdasarkan frekuensi jawaban responden untuk variabel dokumen perencanaan pada pernyataan “anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR” sebanyak 27,8% responden memilih jawaban pada skala 1 dan 2, hal tersebut menunjukkan bahwa masih sering terdapat pemblokiran anggaran yang terjadi pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, misalnya program dan kegiatan belum mendapatkan persetujuan dari DPR, adanya kegiatan yang belum jelas dasar hukumnya, dan adanya rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi, SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan pembahasan yang konstruktif dengan DPR, mengalokasikan anggaran yang telah memiliki dasar hukum, dan membuat rencana kegiatan yang dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.

Pada variabel pencatatan administrasi pada pernyataan “masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung” sebanyak 22,2% responden memilih jawaban pada skala 2, hal tersebut menunjukkan bahwa waktu penyusunan anggaran dianggap terlalu singkat sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mempersiapkan data. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi dapat dilakukan upaya seperti bagian perencanaan dapat mempersiapkan data pendukung dari jauh-jauh hari atau mengajukan kegiatan yang benar-benar telah siap data pendukungnya.

Pada variabel kompetensi sumber daya manusia pada pernyataan “sumber daya pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten” sebanyak 11,1% responden memilih jawaban pada skala 2, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pegawai-pegawai pada beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang masih belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa. Agar suatu instansi memiliki pegawai yang berkompeten dalam bidangnya, seperti adanya kompetensi sumber daya manusia yang memadai untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sebaiknya memilih pelaksana pengadaan barang dan jasa yang terlebih dahulu memiliki sertifikat sehingga proses dalam pengadaan barang dan jasa pun berjalan dengan baik dan tidak menghambat proses penganggaran.

Pada variabel dokumen pengadaan pada pernyataan “pejabat/pengelola keuangan sering mengalami mutasi” sebanyak 25% responden memilih jawaban pada skala 1, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pejabat/pengelola keuangan pada beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang masih

banyak mengalami mutasi pada masa jabatannya belum berakhir. Hal tersebut jelas berdampak buruk pada proses penyerapan anggaran, karena jika pejabat/pengelola keuangan belum habis masa jabatannya dan digantikan maka proses pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan suatu instansi pun harus dimulai dari awal lagi dan dapat menyebabkan tidak tertatanya pengelolaan keuangan yang akhirnya dapat menghambat jalannya proses pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu sebaiknya pemerintah jangan memutasikan pejabat pengelola keuangan sebelum jabatannya berakhir agar pengelolaan keuangan pun tetap tertata dengan baik.

Pada variabel uang persediaan pada pernyataan “kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP tetapi belum diganti melalui Ganti Uang Persediaan (GUP)” sebanyak 22,2% responden memilih jawaban pada skala 2. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai uang persediaan yang belum diganti dengan GUP masih sering terjadi pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka sebaiknya SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan agar dapat menyelesaikan secara cepat mengenai uang persediaan yang sudah dipinjam melalui Ganti Uang Persediaan (GUP).

5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Sampel dalam penelitian ini hanya mengambil dari beberapa SKPD saja, sehingga hasil penelitian ini tidak menyeluruh.

2. Responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini dominan pada jabatan PPK dan PPTK saja, sedangkan untuk jabatan PP SPM dan bendahara pengeluaran hanya beberapa yang melengkapi untuk menjawab kuisisioner.

5.4 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar seluruh responden dapat mengisi kuisisioner yang diberikan sehingga jawaban hasil penelitian juga dapat menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priatno, Prasetyo. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Arifin Siregar, Muhammad. 2008. *Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Semarang: Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.
- Budimanta, Arif. dkk. 2008. *Corporate Sosial Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Djarwanto. 2002. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. *Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim*. Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.
- Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handaya Ningrat, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herriyanto, Hendris. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- http://carapedia.com/pengertian_definisi_administrasi_menurut_para_ahli_info48
Diakses pada tanggal 18 November 2013.
- <http://civiliana.blogspot.com/2013/05/Standar-Dokumen-Pengadaan-Barang-Jasa-Pemerintah-Perpres-No-70-Tahun-2012.html>
Diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

<http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/wXaM9jRW1286266256.pdf>
Diakses pada tanggal 22 Februari 2014.

<http://harianrakyatbengkulu.com/16-kepala-skpd-diberi-toleransi-hingga-31-desember/>
Diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik
Diakses pada tanggal 20 Mei 2014

<http://www.bengkuluonline.com/2014/01/percepat-penyerapan-anggaran-2-skpd-tender-januari.html>
Diakses pada tanggal 21 Mei 2014.

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/PARIS%20REV%20NEW/PR%20Ed%206kcl%20.pdf>
Diakses pada tanggal 21 Mei 2014

<http://www.seputar-kppn.com/index.php/kppn/pencairan-dana/81-seputar-uang-persediaan-up.html>
Diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Miliasih, Retno. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

Nawawi. 2001. *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta: GM University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 tahun 2010. Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business*, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri. 1998. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu Telp. & Fax 0736-344196. Email: ekaunib@gmail.com

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Sdr/I Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir saya sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, saya akan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang akuntansi. Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu”**.

Berikut lampiran data dari peneliti:

Nama : Carlin Tasya Putri
NPM : C1C010030
Fakultas : Ekonomi
Program : Akuntansi

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti berharap Bapak/Ibu/Sdr/i bersedia meluangkan waktu untuk membaca dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan secara jujur, terbuka, dan apa adanya. Hasil penelitian akan digunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan skripsi, tidak digunakan untuk tujuan lain dan akan dijaga kerahasiaannya.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu/Sdr/i atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membaca dan memberi jawaban kuesioner ini.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i penulis mengucapkan terima kasih.

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Bengkulu, Februari 2014
Hormat saya,
Peneliti

Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak,CA
NIP. 19710313 199601 1 001

Carlin Tasya Putri
C1C010030

DAFTAR KUISIONER

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN

Kami mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk menjawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada satuan kerja saudara. Data dan identitas Bapak/Ibu akan kami rahasiakan.

A. Identitas Responden

Petunjuk A: Isilah titik-titik dibawah ini.

1. Nama :
2. JenisKelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Jabatan : (PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran)
4. Lama Bekerja : Tahun
5. Pendidikan : (S3, S2, S1, Diploma, SLTA, Lainnya)*
6. Bid. Pendidikan :
7. Satuan Kerja :
8. Alamat Email* :

B. Pertanyaan Pilihan

Petunjuk B:

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban sesuai dengan persepsi Saudara berdasarkan keterangan nilai seperti di bawah ini:

Keterangan 1:

- STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Keterangan II:

- TP : Tidak Pernah
P : Pernah
K : Kadang-kadang
SR : Sering
SL : Selalu

1. PENYERAPAN ANGGARAN (Y)

No.	PERTANYAAN	SS (1)	S (2)	KS (3)	TS (4)	STS (5)
1.	Tingkat penyerapan anggaran belum mencapai lebih dari 90%.					
2.	Tingkat penyerapan anggaran menurun dari tahun sebelumnya.					
3.	Persentase penyerapan anggaran pada SKPD pernah mendapat raport merah					

2. DOKUMEN PERENCANAAN (X₁)

No.	PERTANYAAN	TP (1)	P (2)	K (3)	SR (4)	SL (5)
1.	Revisi DIPA perlu persetujuan pejabat berwenang.					
2.	Pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam halaman 3 DIPA atau Rencana Anggaran Belanja (RAB).					
3.	Anggaran tidak selaras dengan					

	RPJMD.					
4.	Mata anggaran tidak tersedia untuk kegiatan tertentu.					
5.	Persetujuan revisi DIPA dari pejabat berwenang terlambat diterima.					
6.	Proses revisi anggaran mengalami keterlambatan.					
7.	Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan terlambat ditetapkan.					
8.	DIPA perlu revisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan.					
9.	Anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR.					

3. PENCATATAN ADMINISTRASI (X₂)

No.	PERTANYAAN	TP (1)	P (2)	K (3)	SR (4)	SL (5)
1.	Salah dalam penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen anggaran.					
2.	Berubahnya pelaksanaan kegiatan atas dasar memo kepala daerah.					
3.	Masa penyusunan dan					

	penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung.					
--	--	--	--	--	--	--

No.	PERTANYAAN	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
4.	Verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD.					
5.	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran.					
6.	Adanya tambahan pagu karena ABT, kelebihan realisasi PNBP, tambahan/luncuran PHLN/PHDN, penerimaan hibah.					

4. KOMPETENSI SDM (X₃)

No.	PERTANYAAN	TP (1)	P (2)	K (3)	SR (4)	SL (5)
1.	Panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas).					

No.	PERTANYAAN	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
2.	SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten.					
3.	Keterbatasan pejabat/pelaksana					

	pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat.					
--	---	--	--	--	--	--

5. DOKUMEN PENGADAAN (X₄)

No.	PERTANYAAN	TP (1)	P (2)	K (3)	SR (4)	SL (5)
1.	Pejabat/pengelola keuangan sering mengalami mutasi.					
2.	Kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).					
3.	HPS tidak ditentukan berdasarkan keahlian dan tidak melalui survei pasar.					

6. UANG PERSEDIAAN (X₅)

No.	PERTANYAAN	TP (1)	P (2)	K (3)	SR (4)	SL (5)
1.	Kegiatan sdh dlksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tetapi belum diganti melalui Ganti UP (GUP).					
2.	Adanya pengajuan Uang Persediaan (UP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar.					
3.	Adanya sisa UP/TUP yang harus disetorkan ke kas negara.					

***KETERANGAN:**

- RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- PPKAD : Pendapatan Penegelola Keuangan dan Aset Daerah
- BUD : Bendahara Umum Daerah
- ABT : Anggaran Belanja Tambahan
- PNBPN : Pendapatan Negara Bukan Pajak
- PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- PHDN : Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Daftar Nama 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu

No	NAMA SKPD
1.	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
2.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
3.	Dinas Pertanian
4.	Diskoperindag dan UKM
5.	Dinas Pendidikan
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan)
10.	Dinas Pekerjaan Umum
11.	Dinas Perkebunan

Lampiran 2

Variabel Penyerapan Anggaran

No.	PAN1	PAN2	PAN3	TOTALPAN
1	2	3	2	7
2	3	3	4	10
3	3	3	3	9
4	3	3	4	10
5	2	3	3	8
6	4	3	1	8
7	2	2	3	7
8	3	3	3	9
9	3	2	3	8
10	4	4	3	11
11	2	3	3	8
12	3	3	3	9
13	5	4	4	13
14	3	3	3	9
15	4	4	4	12
16	4	4	3	11
17	4	3	4	11
18	3	3	4	10
19	4	4	4	12
20	3	3	3	9
21	3	4	4	11
22	3	4	3	10
23	3	4	4	11
24	4	4	5	13
25	5	4	4	13
26	3	3	3	9
27	3	3	4	10
28	3	3	2	8
29	3	4	2	9
30	3	4	3	10
31	1	2	2	5
32	4	4	5	13

29	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29
30	4	4	3	4	4	4	4	3	3	33
31	3	2	1	3	2	3	3	2	1	20
32	1	3	2	2	2	2	3	1	2	18
33	3	2	4	2	2	3	2	3	2	23
34	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
35	4	4	5	4	5	4	5	4	5	40
36	4	4	4	4	5	4	4	5	4	38

Lampiran 4

Variabel Pencatatan Administrasi

No.	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	TOTALPA
1	4	4	2	2	2	2	16
2	3	3	3	3	4	3	19
3	4	3	4	3	3	3	20
4	4	3	3	3	3	3	19
5	3	3	2	3	2	3	16
6	3	3	2	3	3	3	17
7	4	4	3	4	4	4	23
8	4	4	4	4	4	3	23
9	3	3	4	4	4	3	21
10	3	4	2	3	3	2	17
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	3	2	4	3	2	18
13	4	4	4	3	4	4	23
14	3	3	2	3	3	3	17
15	4	3	3	3	3	3	19
16	4	2	4	5	4	3	22
17	4	3	4	3	4	3	21
18	4	3	2	2	4	2	17
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	4	4	4	3	4	22
21	3	2	5	4	3	4	21
22	4	2	3	3	3	2	17
23	3	3	3	4	3	4	20
24	4	3	4	5	4	4	24

25	4	4	4	4	4	3	23
26	4	3	3	4	3	3	20
27	3	3	4	3	4	3	20
28	4	4	4	3	3	3	21
29	4	3	3	3	3	3	19
30	4	3	3	3	3	4	20
31	3	3	2	3	3	2	16
32	4	4	5	4	4	4	25
33	2	2	3	2	3	3	15
34	2	3	3	3	3	3	17
35	4	5	5	4	4	4	26
36	3	4	4	3	4	3	21

Lampiran 5

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	KSDM1	KSDM2	KSDM3	TOTALKSDM
1	2	2	3	7
2	3	3	2	8
3	3	3	4	10
4	4	3	3	10
5	2	3	2	7
6	3	3	2	8
7	2	3	3	8
8	4	3	4	11
9	4	2	4	10
10	4	4	4	12
11	2	2	3	7
12	4	3	3	10
13	4	4	4	12
14	3	3	3	9
15	3	3	4	10
16	3	4	4	11
17	3	4	4	11
18	3	3	3	9
19	3	3	4	10
20	3	3	4	10

21	3	3	4	10
22	3	4	4	11
23	4	3	3	10
24	5	5	4	14
25	5	4	4	13
26	4	4	3	11
27	5	5	4	14
28	3	3	3	9
29	3	2	2	7
30	3	5	3	11
31	3	3	3	9
32	4	5	5	14
33	3	3	3	9
34	3	3	3	9
35	4	3	4	11
36	4	5	5	14

Lampiran 6

Variabel Dokumen Pengadaan

No.	DP1	DP2	DP3	TOTALDP
1	2	3	3	8
2	3	3	3	9
3	4	3	3	10
4	3	3	3	9
5	2	2	3	7
6	3	3	3	9
7	2	2	2	6
8	2	3	3	8
9	2	1	2	5
10	3	3	2	8
11	2	3	3	8
12	3	3	3	9
13	5	4	4	13
14	3	3	4	10
15	4	3	3	10
16	3	4	4	11

17	5	4	5	14
18	4	3	3	10
19	4	4	4	12
20	2	2	2	6
21	3	4	4	11
22	4	4	5	13
23	5	5	4	14
24	4	4	3	11
25	5	4	4	13
26	2	3	3	8
27	3	3	3	9
28	3	3	3	9
29	3	2	3	8
30	3	3	2	8
31	2	2	3	7
32	5	5	4	14
33	3	3	2	8
34	3	4	4	11
35	5	5	4	14
36	3	3	4	10

Lampiran 7

Variabel Uang Persediaan

No.	UP1	UP2	UP3	TOTALUP
1	2	3	3	8
2	3	3	3	9
3	2	2	2	6
4	4	3	3	10
5	2	2	3	7
6	3	3	2	8
7	2	3	3	8
8	4	3	3	10
9	3	3	3	9
10	3	3	3	9
11	2	2	3	7
12	3	3	3	9

13	5	4	5	14
14	2	2	3	7
15	3	3	2	8
16	4	4	3	11
17	3	4	4	11
18	4	3	3	10
19	4	4	4	12
20	4	4	3	11
21	4	5	4	13
22	3	3	3	9
23	3	3	4	10
24	5	5	4	14
25	4	3	3	10
26	2	3	3	8
27	4	4	3	11
28	3	3	4	10
29	3	4	4	11
30	3	4	4	11
31	2	2	3	7
32	5	5	4	14
33	3	2	3	8
34	5	4	4	13
35	5	5	4	14
36	4	4	4	12

Lampiran 8

Statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTALDPR	36	17	43	30.75	7.287
TOTALPA	36	15	26	19.92	2.832
TOTALKSDM	36	7	14	10.17	2.007
TOTALDP	36	5	14	9.72	2.445
TOTALUP	36	6	14	9.97	2.249
TOTALPAN	36	5	13	9.97	2.035
Valid N (listwise)	36				

Lampiran 9

Hasil Uji Validitas Data

Variabel Penyerapan Anggaran

		Correlations			
		PAN1	PAN2	PAN3	TOTALPAN
PAN1	Pearson Correlation	1	.661**	.468**	.856**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000
	N	36	36	36	36
PAN2	Pearson Correlation	.661**	1	.458**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.000
	N	36	36	36	36
PAN3	Pearson Correlation	.468**	.458**	1	.795**
	Sig. (2-tailed)	.004	.005		.000
	N	36	36	36	36
TOTALPAN	Pearson Correlation	.856**	.833**	.795**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11

Variabel Pencatatan Administrasi

Correlations

		PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	TOTALPA
PA1	Pearson Correlation	1	.288	.214	.269	.248	.063	.490**
	Sig. (2-tailed)		.088	.210	.113	.144	.717	.002
	N	36	36	36	36	36	36	36
PA2	Pearson Correlation	.288	1	.236	.100	.261	.248	.521**
	Sig. (2-tailed)	.088		.167	.562	.124	.145	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36
PA3	Pearson Correlation	.214	.236	1	.516**	.577**	.642**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.210	.167		.001	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
PA4	Pearson Correlation	.269	.100	.516**	1	.420*	.507**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.113	.562	.001		.011	.002	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
PA5	Pearson Correlation	.248	.261	.577**	.420*	1	.329*	.699**
	Sig. (2-tailed)	.144	.124	.000	.011		.050	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
PA6	Pearson Correlation	.063	.248	.642**	.507**	.329*	1	.716**
	Sig. (2-tailed)	.717	.145	.000	.002	.050		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
TOTAL PA	Pearson Correlation	.490**	.521**	.832**	.713**	.699**	.716**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 12

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Correlations

		KSDM1	KSDM2	KSDM3	TOTALKSDM
KSDM1	Pearson Correlation	1	.549**	.474**	.817**
	Sig. (2-tailed)		.001	.004	.000
	N	36	36	36	36
KSDM2	Pearson Correlation	.549**	1	.521**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.001		.001	.000
	N	36	36	36	36
KSDM3	Pearson Correlation	.474**	.521**	1	.798**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001		.000
	N	36	36	36	36
TOTALKSDM	Pearson Correlation	.817**	.851**	.798**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 13

Variabel Dokumen Pengadaan

		Correlations			
		DP1	DP2	DP3	TOTALDP
DP1	Pearson Correlation	1	.776**	.614**	.907**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	36	36	36	36
DP2	Pearson Correlation	.776**	1	.710**	.927**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36
DP3	Pearson Correlation	.614**	.710**	1	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	36	36	36	36
TOTALDP	Pearson Correlation	.907**	.927**	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 14

Variabel Uang Persediaan

		Correlations			
		UP1	UP2	UP3	TOTALUP
UP1	Pearson Correlation	1	.778**	.535**	.907**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	36	36	36	36
UP2	Pearson Correlation	.778**	1	.637**	.928**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36
UP3	Pearson Correlation	.535**	.637**	1	.785**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000
	N	36	36	36	36
TOTALUP	Pearson Correlation	.907**	.928**	.785**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 15

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penyerapan Anggaran

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	3

Varibel Dokumen Perencanaan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.949	9

Variabel Pencatatan Administrasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	6

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	3

Variabel Dokumen Pengadaan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.871	3

Variabel Uang Persediaan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	3

Lampiran 17

Hasil Uji Multikolinearitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891 ^a	.794	.759	.999

a. Predictors: (Constant), TOTALUP, TOTALPA, TOTALDP, TOTALKSDM, TOTALDPR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.052	5	23.010	23.072	.000 ^a
	Residual	29.920	30	.997		
	Total	144.972	35			

a. Predictors: (Constant), TOTALUP, TOTALPA, TOTALDP, TOTALKSDM, TOTALDPR

b. Dependent Variable: TOTALPAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.104	1.286		.081	.936		
	TOTALDPR	.033	.031	.120	1.085	.287	.564	1.773
	TOTALPA	.001	.072	.001	.007	.994	.684	1.463
	TOTALKSDM	.288	.108	.284	2.668	.012	.607	1.648
	TOTALDP	.320	.089	.384	3.586	.001	.599	1.668
	TOTALUP	.280	.114	.309	2.463	.020	.437	2.290

a. Dependent Variable: TOTALPAN

Lampiran 18

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.435 ^a	.189	.054	.63122

a. Predictors: (Constant), TOTALUP, TOTALPA, TOTALDP, TOTALKSDM, TOTALDPR

b. Dependent Variable: ABS

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.789	5	.558	1.400	.252 ^a
	Residual	11.953	30	.398		
	Total	14.743	35			

a. Predictors: (Constant), TOTALUP, TOTALPA, TOTALDP, TOTALKSDM, TOTALDPR

b. Dependent Variable: ABS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.085	.813		2.565	.016
	TOTALDPR	-.015	.019	-.166	-.757	.455
	TOTALPA	-.067	.046	-.292	-1.468	.152
	TOTALKSDM	.080	.068	.248	1.175	.249
	TOTALDP	.023	.056	.088	.415	.681
	TOTALUP	-.069	.072	-.240	-.966	.342

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.085	.813		2.565	.016
	TOTALDPR	-.015	.019	-.166	-.757	.455
	TOTALPA	-.067	.046	-.292	-1.468	.152
	TOTALKSDM	.080	.068	.248	1.175	.249
	TOTALDP	.023	.056	.088	.415	.681
	TOTALUP	-.069	.072	-.240	-.966	.342

a. Dependent Variable: ABS

Lampiran 19

Hasil Regresi Liner Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891 ^a	.794	.759	.999

a. Predictors: (Constant), TOTALUP, TOTALPA, TOTALDP, TOTALKSDM, TOTALDPR

b. Dependent Variable: TOTALPAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.052	5	23.010	23.072	.000 ^a
	Residual	29.920	30	.997		
	Total	144.972	35			

a. Predictors: (Constant), TOTALUP, TOTALPA, TOTALDP, TOTALKSDM, TOTALDPR

b. Dependent Variable: TOTALPAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.104	1.286		.081	.936
	TOTALDPR	.033	.031	.120	1.085	.287
	TOTALPA	.001	.072	.001	.007	.994
	TOTALKSDM	.288	.108	.284	2.668	.012
	TOTALDP	.320	.089	.384	3.586	.001
	TOTALUP	.280	.114	.309	2.463	.020

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.104	1.286		.081	.936
	TOTALDPR	.033	.031	.120	1.085	.287
	TOTALPA	.001	.072	.001	.007	.994
	TOTALKSDM	.288	.108	.284	2.668	.012
	TOTALDP	.320	.089	.384	3.586	.001
	TOTALUP	.280	.114	.309	2.463	.020

a. Dependent Variable: TOTALPAN